



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *INTELLECTUAL CAPITAL* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021)

Muhammad Fajar Hafidz, Imam Ghozali¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6281398414342

ABSTRACT

The aim from this study is investigate the relationship between good corporate governance on intellectual capital disclosure. The independent variables used in this research is board size, the proportion of independence, board tenure, blockholder ownership, board meeting frequency, audit committee size, and audit committee meeting frequency. Then the dependent variable in this research is intellectual capital disclosure.

The population used in this study consists of companies in manufacturing sector listed on the Indonesian Stock Exchange. Using purposive sampling method, the 114 samples used from companies in manufacturing sector which published annual reports for the period 2019-2021. Multiple regression analysis is used in this study for testing the relationship between board size, the proportion of independence, board tenure, blockholder ownership, board meeting frequency, audit committee size, and audit committee meeting frequency on intellectual capital disclosure.

The results from this study show that board meeting frequency and audit committee size that has positive and significant impact to intellectual capital disclosure.

Keyword: Good Corporate Governance, Intellectual Capital Disclosure, Board Characteristic, Ownership Structure, Good Corporate Governance Activity

PENDAHULUAN

Intellectual capital (IC) atau modal intelektual disebutkan sebagai aset tidak berwujud milik perusahaan yang memiliki potensi membantu daya saing perusahaan dalam efisiensi pasar modal (Petty & Guthrie, 2000). IC sendiri dibentuk dan ditujukan kepada para pemangku kepentingan yang disajikan secara sukarela oleh perusahaan (Petty & Cugnesan, 2005).

*Akan tetapi, belum dimilikinya kerangka kerja yang tepat pada laporan keuangan untuk dilakukannya pengungkapan IC. Pengungkapan secara sukarela atau voluntary disclosure dilakukan sebagai bentuk mengatasi keterbatasan informasi perusahaan mengenai aset tidak berwujud. Kini sudah banyak perusahaan melakukan *voluntary disclosure* dengan bentuk naratif pada laporan perusahaan sebagai bentuk dari pemenuhan permintaan pasar akan informasi yang lebih diandalkan (Abeysekera, 2010); (Haji & Ghozali, 2013).*

*Good Corporate Governance (GCG) atau Tata kelola perusahaan merupakan semua sistem kontrol yang dibuat sebagai penunjang efisiensi dan keberjalanan operasi perusahaan demi memenuhi kepentingan *stakeholder*. Elshandidy & Neru (2015) menjelaskan bahwa peran pemantauan dari GCG berdampak jelas terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan. *Corporate Governance* yang diterapkan antar satu negara dengan yang lain pasti memiliki perbedaan. Penerapan GCG yang bervariasi tersebut disebabkan oleh regulasi terkait perusahaan berbeda di setiap negara. Indonesia menggunakan sistem two-tier board dalam sistem GCG berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.*

Donnelly & Mulcahy (2008) menganut bahwa pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkat dengan GCG yang diterapkan oleh perusahaan berjalan dengan efektif. Kothari (2000) meyakini hal yang sama bahwa kualitas sistem tata kelola perusahaan

¹ Corresponding author

mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta berdampak pada pengembangan dari modal intelektual.

Fakta lapangan mengenai standar penetapan aset tak berwujud wajib dituangkan dalam laporan melalui pengungkapan secara mandatory ataupun voluntary belum ada di Indonesia. Hal ini juga disebutkan oleh Widyaningrum (2004) bahwa Indonesia belum memiliki aturan khusus terkait modal intelektual. Landasan tersebut menjadikan peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang masalah ini. Faktor seperti peran dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan dapat digunakan dalam menilai efektivitas modal intelektual guna meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian Alfraih (2018) mengenai Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dalam Pengungkapan Modal Intelektual menjadi inspirasi penenilitan ini. Alfraih (2018) menggunakan ukuran dewan, proporsi komisaris independen, *CEO duality*, kepemilikan *blockholder*, dan kepemilikan pemerintah sebagai variabel independen pada penelitiannya. Alfraih menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Kuwait (KSE) sebagai sampel penelitian.

Peneliti menambahkan variabel tambahan yang mengacu pada penelitian Jing Li, *et al.* (2008) tentang aktivitas dari mekanisme GCG yakni, masa jabatan dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit. Hal ini juga menjadi *research gap* pada penelitian ini. Kerangka kerja pada penelitian ini mengacu pada IFAC (International Federation of Accountant). Kerangka kerja ini berhasil digunakan pada beberapa penelitian terkait modal intelektual. Kerangka kerja yang dipublikasi oleh IFAC terdiri dari 3 kategori serta 24 komponen.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian, dan pengembangan hipotesis penelitian.

Teori Agensi

Hadirnya pendapat Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori agensi mengenai hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Hubungan ini berkaitan erat dengan pelimpahan wewenang dari *principal* (berperan sebagai fasilitator) kepada *agent* (berperan meningkatkan kinerja perusahaan).

Namun demikian, antara *principal* dengan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda. *Principal* lebih mengutamakan sisi keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Sedangkan *agent* berfokus pada aktivitas yang mendatangkan laba besar dalam waktu singkat. Hal ini memicu terjadinya konflik agensi. Healy & Palepu (2001) menyatakan alternatif dalam menyelesaikan konflik yakni dengan menggunakan peran dari dewan komisaris sebagai pengawas manajer.

Korelasi antara teori agensi dengan pengungkapan modal intelektual adalah bentuk pembuktian dari manajer kepada para pemegang saham atas kinerja mereka yang optimal. Dengan diungkapkannya informasi pada pelaporan secara tidak langsung membuat tingkat kepercayaan para pemegang saham kepada manajer dan dewan komisaris semakin meningkat.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwasanya jumlah ini akan berdampak terhadap cara atau bagaimana para direksi melaksanakan tanggung jawab mereka. Berdasarkan sudut pandang teori agensi, dinyatakan bahwasanya dewan yang memiliki ukuran yang lebih banyak memiliki kemungkinan lebih untuk mendeteksi masalah agensi yang terjadi atau akan terjadi disebabkan menyediakan keterampilan yang lebih tinggi dan monitoring manajemen.

Mahoney & Wang (2009) menyatakan pendapat bahwa dengan menambah lebih banyak anggota dalam jajaran dewan akan memberikan informasi dan sumber daya yang berpotensi dan bermanfaat. Dengan demikian, dewan yang lebih besar akan menciptakan peningkatan dalam daya saing perusahaan serta memberikan peningkatan pada lingkungan perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat rumusan hipotesis:

H1: Ukuran dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa komposisi dewan independen adalah sebuah sistematis atau mekanisme penting yang ada pada konflik agensi internal. Perwakilan eksternal lebih tinggi juga dinilai menjadi saran dikarenakan orang-orang akan lebih bersikap objektif untuk melakukan monitoring manajemen (Sundaramurthy *et al.*, 1997).

Menurut pandangan teori agensi, komisaris independen dirasa jauh efektif untuk melakukan monitor manajemen. *Monitoring* oleh komisaris independen dianggap dapat menyelesaikan permasalahan agensi. Selain itu, kontribusi yang komisaris independen dapat lakukan terhadap pengurangan operasional biaya agensi.

Fama & Jensen (1983) memiliki hipotesis bahwa independensi dewan komisaris terdorong dalam memberikan pengembangan terhadap reputasi yang menjadi ahli pada proses manajemen. Proporsi komisaris independen yang mempunyai reputasi baik mempunyai motivasi dalam menaikkan jumlah serta mutu dari proses pengungkapan (Huafang & Jianguo, 2007). Kemudian Cerbioni & Parbonetti (2007) bahwasanya GCG perusahaan yang baik ditandai dengan kebanyakan direktur eksternal yang turut menjalankan monitoring, hal ini dianggap penting untuk menaikkan mutu dari proses pengungkapan yang sifatnya sukarela. Maka dari itu, penelitian ini mengangkat rumusan hipotesis:

H2: Independensi dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Fenomena tentang masa jabatan dari dewan komisaris mempunyai jumlah yang sedikit serta masih menghadirkan bukti berbeda dengan pengaruh dari lama menjabatnya sebagai dewan. Vafeas (2003) mengungkapkan dewan yang memiliki masa jabatan lama mempunyai wawasan lebih baik tentang perubahan dunia bisnis dan perusahaan. Bryd *et al.* (2010) mengungkapkan bahwasanya ikatan secara jangka panjang dari dewan komisaris dan jajaran direksi dapat memberikan peningkatan pada permasalahan agensi serta fungsi monitoring terhadap manajemen semakin kurang efektif.

Pendapat berbeda muncul dari sejumlah hasil riset bahwasanya masa kerja yang lama menjadikan dewan akan bersikap sangat kritis dibandingkan masa jabatan yang belum lama (Bebchuk *et al.*, 2005). Hal tersebut terjadi sebab masa jabatan tinggi merefleksikan pengalaman dan adanya keahlian yang mumpuni dan lebih baik (Kruger, 2010). Dengan demikian, penelitian ini berhipotesis bahwasanya:

H3: Masa jabatan dewan komisaris perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Kepemilikan Blockholder Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Bonazzi & Islam (2007), mengungkapkan bahwasanya sistematis kontrol yang efektif dalam menekan biaya agensi dan mendesak manajer dalam melahirkan keputusan dan tindakan untuk menguntungkan pihak pemegang saham yang baik telah menjadi perhatian utama bagi CG. Sama dengan Jensen (1993) mengungkapkan bahwasanya struktur kepemilikan penting untuk proses monitoring serta CG. Telah lama teori keuangan mengakui bahwa peran penting dari ukuran pemilik saham dalam CG (Dhillon & Rossetto, 2009).

Edmans (2014) mengklaim bahwasanya pemilik saham besar menjalankan peran penting pada pengelolaan perusahaan dikarenakan ukuran saham mereka. Maka pemilik blok dapat turut membantu peningkatan pada mutu proses dan juga transparansi. Disebabkan keefektifitasan *blockholder* serta kemampuan yang dimiliki terkait peningkatan akuntabilitas, transparansi serta pengungkapan, harapannya komposisi dari kepemilikan *blockholder* yang lebih tinggi dapat berdampak baik terhadap peningkatan dari proses pengungkapan IC. Maka dari itu, rumusan hipotesis yang diangkat yakni:

H4: Kepemilikan *blockholder* perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Selaras dengan teori agensi dimana kepentingan antara principal dan agen memiliki perbedaan sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Upaya pencegahan terjadinya konflik tersebut, selarasnya informasi dari beberapa pihak terkait dapat dilakukan dengan menjalankan aktivitas tata kelola yaitu rapat dewan komisaris. Aktivitas tersebut dapat digunakan para anggota dewan komisaris untuk melakukan komunikasi antar sesama anggota dalam pengawasan manajemen serta diadakannya rapat secara rutin maka dewan komisaris bisa semakin efektif dalam melakukan pengawasan dan membantu peran direksi dalam membuat keputusan (Widagdo & Chariri, 2014).

Frekuensi rapat dewan komisaris bisa dijadikan sebagai indikator kepatuhan dari dewan komisaris untuk *monitoring* apa yang dilakukan terhadap laporan perusahaan sebagai bentuk memenuhi tanggung jawabnya (Suripto, 2012). Sebelum memberikan transparansi atas informasi kepada para investor, maka dewan komisaris bisa tetap melakukan pengawasan atas kinerja manajemen dalam melakukan pengungkapan informasi dengan cakupan yang luas dalam laporan keuangannya (Pitasari & Septiani, 2014). Dengan demikian, penelitian ini berhipotesis bahwasanya:

H5: Frekuensi rapat dewan komisaris perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Dengan pandangan teori agensi dimana melihat tata kelola perusahaan dapat menjadi lebih efektif oleh hadirnya komite audit dikarenakan dampak dukungan dalam monitoring laporan keuangan dan proses berjalannya audit dalam perusahaan (The Sarbanes Oxley Act, 2002). Merujuk pada Bedard *et al.* (2004) memberikan saran akan komite audit yang berisikan jumlah yang cukup besar karena memiliki ciri, keahlian dan juga kekuatan dan menjadikannya memiliki potensi dalam melakukan pengungkapan dan melakukan penyelesaian masalah dalam proses pelaporan keuangan.

Dalam riset oleh Mangena & Pike (2005) menunjukkan hasil bahwa tidak ditemukannya keterkaitan ukuran komite audit terhadap skala proses pengungkapan IC secara sukarela pada laporan tahunan. Jing Li, R. Pike & Roszaini Haniffa (2008) memberikan hasil penelitian yang konsisten dengan teori agensi, yakni ukuran komite audit memberikan pengaruh positif pada pengungkapan IC. Lalu, Buallay (2018) menemukan hasil yang sama yakni adanya pengaruh positif antara komite audit dengan efisiensi Capital Employed.

Peran dari komite audit sendiri sebagai komponen mekanisme GCG internal pada perusahaan akan memiliki pengaruh pada keandalan laporan keuangan perusahaan dan memaksimalkan kualitas serta pengungkapan yang meningkat (Ho & Shun Wong, 2001). Maka dari itu, rumusan hipotesis yang diangkat yakni :

H6: Ukuran komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan IC

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Perusahaan Terhadap Pengungkapan IC

Aktivitas dari mekanisme GCG salah satunya diukur melalui frekuensi rapat dari komite audit. Frekuensi ini dinilai sebagai gambaran dari evaluasi *due diligence* komite audit. Pertemuan rutin dari komite audit merupakan upaya dalam meningkatkan efisiensi peran dalam melakukan pemantauan proses laporan perusahaan itu sendiri (Karamanou & Vafeas, 2005).

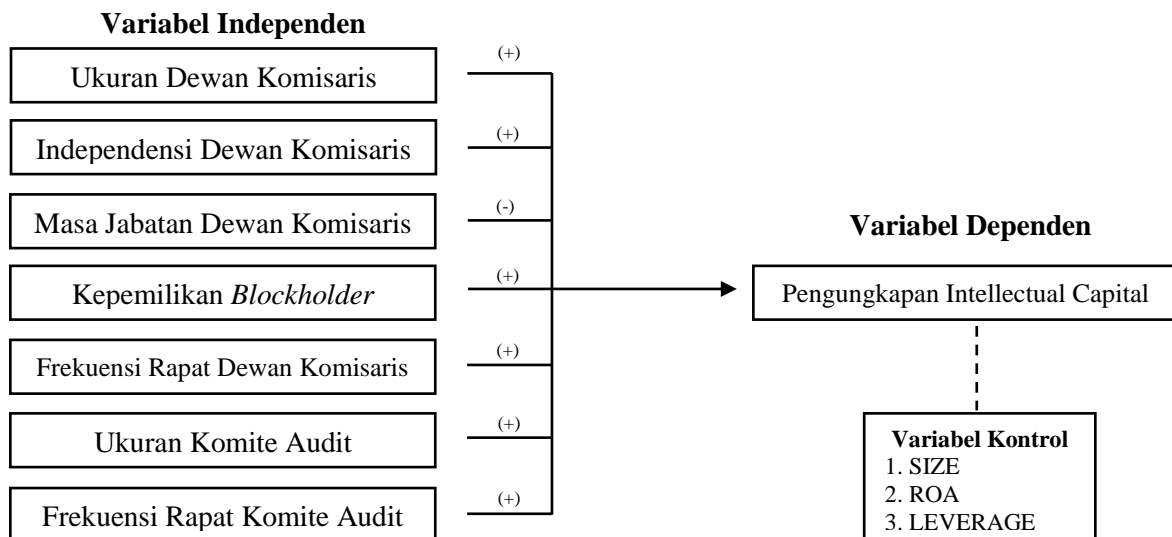
Rapat yang dilakukan komite audit diharap dapat menyelesaikan masalah kompleks perusahaan, maka dari komite audit disarankan untuk menyisihkan waktu untuk melakukan rapat yang rutin (Raghunandan & Rama, 2007). Frekuensi yang disarankan untuk dilakukan komite audit minimal tiga hingga empat kali pada periode setahun (Financial Reporting Council, 2008). Dalam beberapa penelitian tidak menunjukkan keterkaitan yang ada antara frekuensi rapat komite audit dan pelaporan keuangan (Mohammad, 2012) serta kinerja perusahaan (Aldamen, 2012).

Dengan hasil riset oleh Haji & Ghazali dan Li *et al.* (2012) maka penelitian ini mengharapkan kinerja komite audit dalam monitoring proses pelaporan laporan keuangan menjadi efektif melalui frekuensi rapat yang rutin. Berikut hipotesis yang diangkat:

H7: Frekuensi rapat komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan IC

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, variabel-variabel yang digunakan beserta pengukurannya, serta model penelitian.

Populasi dan Sampel

Disini populasi yang dipakai yakni sejumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2021. Perusahaan sektor manufaktur dipilih dikarenakan mempunyai beragam sub sektor bisnis maupun industri. Perusahaan juga disokong dengan beragam strategi serta dukungan teknologi dalam memberikan pengembangan pada produk dan ini menjadikannya penting pada proses pemanfaatan SDM serta perusahaan. Dengan demikian, pengukuran terhadap kinerja modal intelektual sangat dibutuhkan.

Penelitian ini menerapkan jenis purposive sampling dalam mengambil sampel yakni didasarkan pada ketersediaan informasi serta kriteria tertentu menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria yang ditentukan pada sampel antara lain:

1. Perusahaan dalam sektor manufaktur di BEI sepanjang periode tahun 2019-2021.
2. Perusahaan yang merilis berturut-turut laporan tahunan yang sudah dijalankan audit pada BEI sepanjang tahun 2019-2021.
3. Perusahaan yang merilis laporan tahunan.
4. Menyampaikan data yang dibutuhkan peneliti guna melakukan pengukuran.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol sebagai komponen yang digunakan.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang dipakai ialah pengungkapan IC. Merujuk pada Whiting & Miller (2008) melakukan peninjauan ulang pada studi mengenai proses pengungkapan IC serta faktornya, serta menyatakan bahwasanya analisis tentang hasil isi laporan hampir bertujuan menilai skala dari

proses pengungkapan IC. Dilibatkannya modifikasi informasi ke dalam kategori tertentu dengan tujuan mendapatkan pola dalam penyajian serta penyampaian informasi pada pendekatan ini (Guthrie *et al.*, 2004). Teknik ini umumnya memberikan kode elemen kepada kerangka kerja pengungkapan IC perusahaan (Lee & Guthrie, 2010).

Ada beberapa cara dalam penerapan teknik ini. Cara-cara yang termasuk ke dalamnya adalah melakukan perhitungan terhadap kata kunci, kalimat, bagian, atau dirujuk dari bacaan teks secara menyeluruh (Gamerschlag, 2013). Kata kunci diberikan definisi melalui adanya kerangka kerja yang diberikan oleh Sveiby (1997) serta adanya modifikasi oleh Guthrie *et al.* (2004), yang dipergunakan di sejumlah hasil studi mengenai IC. Kerangka tersebut mencakup sekitar 3 kategori serta 24 komponen. Tiga kategori ini antara lain: modal internal, eksternal serta SDM. Berikut akan ditunjukkan secara lengkap kerangka kerja tersebut:

Tabel 1
Kerangka Modal Intelektual

Modal Internal	Modal Eksternal	Modal Manusia
Hak Kekayaan Intelektual	Merk	Pendidikan
Budaya Perusahaan	Pelanggan	Keterampilan
Paten / Hak Cipta / Merk Dagang	Nama Perusahaan	Kopmetensi / Pengetahuan Relasi Kerja
Sistem Informasi	Kepuasan Pelanggan	Kualifikasi Akademik
Sistem Jaringan	Loyalitas Pelanggan	Kualifikasi Profesional
Proses Manajemen	Jaringan Distribusi	Modal Manusia / Sumber Daya
Filosofi Manajemen	Kolaborasi Bisnis	Semangat Kewirausahaan, Kemampuan Berinovasi, Proaktif Dan Reaktif, Kapabilitas Untuk Berubah
Hubungan Finansial	Perjanjian Lisensi	Pemberdayaan SDM

Studi empiris terdahulu Guthrie & Petty (2000), Li *et al.* (2008), kemudian Abeysekera (2010), dan Haji & Ghazali (2013) menerapkan jenis pendekatan secara dikotomis (tanpa pemberian bobot). Proses ini akan memberikan nilai “0” terhadap setiap nondisclosure dan diberikan nilai “1” apabila terdapat item (jumlah maksimal nilai adalah 24). Cooke (1989) mengungkapkan bahwasanya pendekatan ini dinilai sangat objektif dibandingkan dengan pendekatan tertimbang. Merujuk pada Abeysekera (2010) menyatakan pendapat bahwa penetapan bobot terhadap setiap jenis pengungkapan IC dapat menimbulkan kesalahan dikarenakan pemberian skala yang bias.

Konsisten, di setiap item dalam penelitian ini akan diberikan bobot sepadan. Setiap laporan diperiksa untuk diidentifikasi adanya 24 kata kunci serta perolehan skor tercatat di dalam lembar kode. Setiap perusahaan, skor total pengungkapan diukur dengan indeks dalam menilai skala dari proses pengungkapan relatifnya. Indeks ini berupa rasio skor pengungkapan yang aktual dengan jumlah maksimal yakni sekitar 24.

Variabel Independen dan Kontrol

Terdapat 7 variabel independen, antara lain ukuran dewan komisaris (BSIZE), independensi dewan komisaris (OUT), masa jabatan anggota dewan komisaris (BTENURE), kepemilikan *blockholder* (BLOCK), frekuensi rapat dewan komisaris (BMEET), ukuran komite audit (KOM), dan frekuensi rapat komite audit (KMEET). Kemudian terdapat 3 variabel kontrol antara lain SIZE, LEV serta ROA. Setiap variabel akan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2
Variabel & Pengukurannya

Variabel	Simbol	Pengukuran
Ukuran Dewan Komisaris	BSIZE	Σ Anggota dewan komisaris pada tahun tersebut
Independensi Dewan Komisaris	OUT	Perbandingan Σ Anggota dewan komisaris independen dengan Σ Anggota dewan komisaris
Masa Jabatan Dewan Komisaris	BTENURE	Rata-rata lama masa jabatan setiap anggota dewan komisaris
Kepemilikan <i>Blockholder</i>	BLOCK	Kepemilikan saham biasa yang dimiliki <i>blockholder</i> (minimal 5%)
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	BMEET	Jumlah total rapat dewan komisaris dalam satu periode
Ukuran Komite Audit	KOM	Σ anggota komite audit pada tahun tersebut
Frekuensi Rapat Komite Audit	KMEET	Jumlah total rapat komite audit dalam satu periode
Ukuran Perusahaan	SIZE	Log Natural (LN) dari total aset perusahaan
Struktur Modal	LEV	Total hutang dibagi Total aset
Kinerja Perusahaan	ROA	Laba bersih dibagi Total aset

Model Analisis

Variabel yang ada diuji menggunakan uji regresi berganda. Analisis ini menilai dan melihat seberapa kuat pengaruh atau korelasi dari *independent variable* kepada *dependent variable*, dan digunakan untuk menunjukkan arah korelasi atau pengaruh yang dihasilkan.

Model regresi pada uji hipotesis menerapkan:

$$IC = \beta_0 + \beta_1 BSIZE + \beta_2 OUT + \beta_3 BTENURE + \beta_4 BLOCK + \beta_5 BMEET + \beta_6 KOM + \beta_7 KMEET + \varepsilon_i$$

Keterangan :	ICD	: Pengungkapan modal intelektual
	β	: Koefisien regresi
	BSIZE	: Ukuran dewan komisaris
	OUT	: Independensi dewan komisaris
	BTENURE	: Masa jabatan dewan komisaris
	BLOCK	: Kepemilikan <i>blokholder</i>
	BMEET	: Frekuensi rapat dewan komisaris
	KOM	: Ukuran komite audit
	KMEET	: Frekuensi rapat komite audit
	ε_i	: Nilai residual (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan pemilihan sampel serta hasil pengujian dijelaskan lebih lanjut pada bagian ini. Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 2
Pemilihan Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI	191
2.	Perusahaan sektor manufaktur yang tidak sesuai dengan kriteria	(147)
3.	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sampel	44
4.	Total sampel penelitian (44 x 3)	132
	<i>Outlier sample</i>	(18)
Jumlah sampel penelitian (Sampel bersih)		114

Statistik Deskriptif

Tabel 3
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BFSIZE	114	2,00000	10,000000	5,3947368	1,85595631
OUT	114	,25000	,83333	,4358594	,11736196
BTENURE	114	,00000	17,66667	6,1283548	4,06140938
BLOCK	114	,00000	,98560	,6529845	,20117326
BMEET	114	3,00000	14,00000	6,8333333	1,92752153
KOM	114	2,00000	4,000000	3,1315789	,36465908
KMEET	114	3,00000	32,00000	6,6578947	4,64839671
SIZE	114	20,27194	26,62947	23,8804537	1,27069997
ROA	114	-,25103	,35802	,0583996	,08559546
LEV	114	,11156	,66649	,2919311	,13213229
ICD SCORE	114	,45833	,95833	,7379384	,11423985
VALID N (listwise)	114				

Sumber: IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas Model Regresi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N	,114
Kolmogorov-Smirnov Z	,746
Asymp. Sig. (2-tailed)	,633

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Hasil dari tabel 4 menyatakan bahwasanya data penelitian dapat dinyatakan mengalami distribusi secara normal bilamana hasil uji normalitas atau P-value > 0,05 (Ghazali, 2018). Hasil

yang ditunjukkan pada tabel 4 dengan nilai Asymp. Sig yakni $0,633 > 0,05$ mengartikan data penelitian dinyatakan mengalami distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas Model Regresi

Model	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
BSIZE	,743	1,346
OUT	,799	1,252
BTENURE	,853	1,172
BLOCK	,766	1,306
BMEET	,630	1,587
KOM	,744	1,345
KMEET	,619	1,614

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Pada tabel 5 memperlihatkan bahwa setiap variabel penelitian menghasilkan perolehan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$. Maka dari nilai tersebut bermakna bahwasanya data pada setiap variabel tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas Model Regresi

Model	Sig.
BSIZE	,731
OUT	,328
BTENURE	,252
BLOCK	,069
BMEET	,127
KOM	,371
KMEET	,279

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Uji Glejser dalam penelitian ini memiliki ketentuan data penelitian dinyatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas yakni apabila perolehan nilai Sig $> 0,05$. Berdasar pada tabel 6, seluruh variabel penelitian menghasilkan perolehan nilai Sig. $> 0,05$. Hal ini dinyatakan bahwasanya data varian tidak ditemukan adanya indikasi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7
Uji Autokorelasi Model Regresi

Model	R	R Square	Adj R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,575 ^a	,330	,324	,08583643	2,035

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Perolehan nilai Durbin-Watson menjadi indikator apakah data penelitian terdapat gejala autokorelasi atau tidak. Syarat ketentuan bahwa data variabel tidak memiliki gejala autokorelasi adalah $dU < DW < 4 - dU$.

Perolehan nilai dU berasal dari tabel distribusi Durbin-Watson yang disesuaikan dengan kuantitas dari sampel (N) dan jumlah variabel bebas (k). Jumlah sampel yang digunakan sejumlah 114 serta memakai 10 variabel bebas yang mana perolehan nilai dU = 1,8882.

Jika digambarkan sesuai dengan syarat ketentuan terkait uji autokorelasi dimana hasilnya yakni $1,8882 < 2,035 < 2,1118$. Maka pada penelitian ini dapat dinyatakan tidak ditemukan indikasi adanya autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi (R²) Model Regresi

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,413 ^a	,171	,090	,10895449

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Dalam tabel 8 nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,090. Indikasi yang muncul adalah variabel independen pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 9%, sedangkan 91% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Uji Statistik F

Tabel 9
Uji Statistik F Model Regresi

<i>Model</i>	<i>Sum of Square</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 <i>Regression</i>	,252	10	,025	2,123	,029 ^b
<i>Residual</i>	1,223	103	,012		
<i>Total</i>	1,475	113			

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Tabel 9 menunjukkan nilai F hitung yakni 2,123 dan p-value yakni 0,029. Dengan nilai p-value < 0,05, hal ini bermakna variabel bebas secara keseluruhan layak dipakai sebagai alat prediksi terhadap variabel dependen yakni *Intellectual Capital Disclosure* secara simultan.

Uji T-test

Tabel 10
Uji T-test

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standar Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
(Constant)	,672	,243		2,769	,007
BSIZE	-,002	,006	-,038	-,366	,715
OUT	,058	,098	,060	,594	,554
BTENURE	-,001	,003	-,027	-,276	,783
BLOCK	-,084	,058	-,147	-1,437	,154
BMEET	,018	,007	,297	2,631	,010
KOM	,065	,033	,208	1,999	,048
KMEET	-,010	,003	-,390	-3,417	,001
SIZE	-,006	,009	-,063	-,638	,525
ROA	,187	,131	,140	1,431	,155

LEV	- ,081	,086	- ,094	- ,937	,351
-----	--------	------	--------	--------	------

Sumber : IBM SPSS Output, pengolahan data sekunder tahun 2023

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis awal ini dilakukan uji pada pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap proses pengungkapan IC di sejumlah perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Hasil pengujian ini menjelaskan skala signifikansi atau p-value sebesar $0,715 > 0,05$ atau lebih besar dari angka 0,05 dan nilai t yakni $-0,366$. Hal ini bermakna bahwa **H1 ditolak** yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara ukuran dewan komisaris pada skala dari pengungkapan IC.

Pengaruh Independensi Komisaris Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis kedua ini dilakukan uji pada pengaruh independensi dewan komisaris terhadap skala proses pengungkapan IC di sejumlah perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value $0,554 > 0,05$ atau lebih tinggi dibandingkan angka 0,05 yang mana perolehan t yakni $0,594$. Maka disimpulkan bahwasanya **H2 ditolak** yang artinya tidak ditemukan pengaruh dari ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan IC.

Pengaruh Masa Jabatan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis ketiga ini dilakukan uji pada pengaruh independensi dewan komisaris terhadap tingkat proses pengungkapan IC di sejumlah perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value sebesar $0,783 > 0,05$ atau lebih tinggi dibandingkan 0,05 dimana perolehan nilai koefisien beta yakni $-0,276$. Hal ini bermakna bahwasanya **H3 ditolak** atau tidak ditemukan pengaruh antara ukuran dewan komisaris pada kala proses pengungkapan IC.

Pengaruh Kepemilikan Blockholder Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis keempat ini dilakukan uji pada pengaruh independensi dewan komisaris terhadap skala proses pengungkapan IC di sejumlah perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value sebesar $0,154 > 0,05$ atau lebih tinggi dibandingkan 0,05 dimana perolehan nilai t sebesar $-1,437$. Hal ini bermakna bahwasanya **H4 ditolak** yang artinya tidak ditemukan pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan skala proses pengungkapan IC.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis kelima ini dilakukan uji pada pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap tingkat proses pengungkapan IC di perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value sebesar $0,010 < 0,05$ atau kecil dibandingkan 0,05 dengan nilai t sebesar $2,631$. Hal tersebut bermakna bahwasanya **H5 diterima** yang artinya ditemukan pengaruh antara frekuensi rapat dewan komisaris dengan skala proses pengungkapan IC.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis keenam ini dilakukan uji pada pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap skala proses pengungkapan IC di perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value sebesar $0,048 < 0,05$ atau rendah dari angka 0,05 yang mana perolehan nilai t sebesar $1,999$. Hal ini bermakna bahwasanya **H6 diterima** yang artinya ditemukan pengaruh antara frekuensi rapat dewan komisaris pada skala proses pengungkapan IC.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan IC

Pada hipotesis ketujuh ini dilakukan uji pada pengaruh antara frekuensi rapat komite audit terhadap tingkat proses pengungkapan IC di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Hasil uji ini menjelaskan tingkat dari signifikansi atau p-value sebesar $0,001 < 0,05$ atau di bawah angka 0,05 yang mana perolehan nilai t sebesar $-3,417$. Hal ini mengartikan bahwasanya **H7 ditolak** yang



artinya ditemukan pengaruh secara negatif antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan IC yang mana berbeda dengan prediksi hipotesis sebelumnya.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Bagian ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian kedepannya.

Kesimpulan

Tujuan dilakukannya penelitian ini dari penyusunan pertama hingga dilakukan olah data diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel frekuensi rapat dewan komisaris (BMEET) dan ukuran komite audit (KOM) memberikan pengaruh positif serta signifikan pada tingkat pengungkapan IC.
2. Variabel frekuensi rapat komite audit (KMEET) memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan IC.
3. Variabel ukuran dewan komisaris (BSIZE), independensi dewan komisaris (OUT), masa jabatan dewan komisaris (BTENURE), dan kepemilikan *blockholder* (BLOCK) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan IC.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang ada, diantaranya:

1. Sampel penelitian pada sektor manufaktur terhitung kecil dikarenakan sampel tidak sesuai kriteria ataupun terkena outlier.
2. Pada aspek ukuran komite audit, frekuensi rapat dewan komisaris, serta frekuensi rapat komite audit, keterbatasan ditemukan dari perolehan referensi literatur terkait penelitian pada aktivitas mekanisme GCG terhadap pengungkapan IC.
3. Framework yang peneliti gunakan dalam proses pengungkapan IC memiliki sisi subjektivitas. Sehingga, memungkinkan perbedaan pendapat, pandangan, dan pemahaman berpotensi adanya sisi subjektivitas dari penelitian.

Saran

Atas hasil penelitian yang dilakukan dan keterbatasan pada penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Penelitian berikutnya diharapkan menambah perluasan pada sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria.
2. Sebagai upaya meminimalisir segi subjektivitas pada penelitian, peneliti berharap penelitian di kemudian hari dapat melakukan pengukuran menggunakan nilai numerik dan nilai moneter pada kualitas pengungkapan IC.
3. Dari segi struktur kepemilikan, penelitian di kemudian hari dapat menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga sebagai variabel baru.
4. Dari segi aktivitas mekanisme GCG, penelitian dikemudian hari dapat menggunakan aktivitas dari komite remunerasi serta ukurannya.



REFERENSI

- Abeysekera, I. (2010). The influence of board size on intellectual capital disclosure by Kenyan listed firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4), 504–518. <https://doi.org/10.1108/14691931011085650>
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. (2005). An empirical investigation of annual reporting trends of intellectual capital in Sri Lanka. *Critical Perspectives on Accounting*, 16(3), 151–163. doi:10.1016/s1045-2354(03)00059-5
- Albassam, W. (2014). Corporate Governance, Voluntary Disclosure and Financial Performance: An Empirical Analysis of Saudi Listed Firms Using A Mixed Methods Research Design. (PhD), University of Glasgow. PhD thesis
- Alfraih, M. M. (2018). The role of corporate governance in intellectual capital disclosure. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(1), 101–121. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2017-0026>
- Cerbioni, F., & Parbonetti, A. (2007). Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: An analysis of European biotechnology companies. In *European Accounting Review* (Vol. 16, Issue 4). <https://doi.org/10.1080/09638180701707011>
- Donnelly, R., & Mulcahy, M. (2008). Board structure, ownership, and voluntary disclosure in Ireland. *Corporate Governance: An International Review*, 16(5), 416–429. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2008.00692.x>
- Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review*, 23(4), 331–356. doi:10.1111/corg.12095
- Edmans, A. (2014). Blockholders and Corporate Governance. *Annual Review of Financial Economics*, 6(1), 23–50. doi:10.1146/annurev-financial-110613-034455
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. doi:10.1086/467037
- FASB. (2001). Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures. *The Financial Standards Accounting Boards*.
- Fich, E. M., & Shivdasani, A. (2006). Financial Fraud, Director Reputation, and Shareholder Wealth. *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.687412
- Gamerschlag, R. (2013). Value relevance of human capital information. *Journal of Intellectual Capital*, 14(2), 325–345. doi:10.1108/14691931311323913
- Gan, K., Saleh, Z., Abessi, M., & Huang, C. C. (2013). Intellectual capital disclosure in the context of corporate governance. *International Journal of Learning and Intellectual Capital*, 10(1). doi:10.1504/ijlic.2013.052077
- Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. *Journal of Intellectual Capital*, 1(3), 241–251. <https://doi.org/10.1108/14691930010350800>
- Haji, A. A., & Ghazali, N. A. M. (2013). A longitudinal examination of intellectual capital disclosures and corporate governance attributes in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 21(1), 27–52. <https://doi.org/10.1108/13217341311316931>
- Handajani, L., Subroto, B., Sutrisno, T., & Saraswati, E. (2014). Does board diversity matter on corporate social disclosure? An Indonesian evidence. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5, 8–16.
- He, J., Mahoney, J. T., & Wang, H. C. (2009). Firm capability, corporate governance and competitive behaviour: a multi-theoretic framework. *International Journal of Strategic Change Management*, 1(4). doi:10.1504/ijscm.2009.031408

- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1–3), 405–440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22(6), 604–619. doi:10.1108/02686900710759406
- Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3). doi:10.1111/j.1540-6261.1993.tb04022.x
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. doi:10.1177/0018726718812602
- Keenan, J., & Aggestam, M. (2001). Corporate governance and intellectual capital: Some conceptualisations. *Corporate Governance*, 9(4), 259–275. doi:10.1111/1467-8683.00254
- Kothari, S. P. (2005). Capital Markets Research in Accounting. *SSRN Electronic Journal*, 617. doi:10.2139/ssrn.235798
- Kruger, P. (2010). Corporate Social Responsibility and the Board of Directors. www.sfgeneva.org/doc/110317_kruegerCsrandBoard.pdf. Accessed on January 2013
- Li, J. (1994). Ownership structure and board composition: A multi-country test of agency theory predictions. *Managerial and Decision Economics*, 15(4), 359–368. doi:10.1002/mde.4090150409
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structure in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159. doi:10.1080/00014788.2008.9663326
- Mak, Y. T., & Li, Y. (2001). Determinants of corporate ownership and board structure: evidence from Singapore. *Journal of Corporate Finance*, 7(3), 235–256. doi:10.1016/s0929-1199(01)00021-9
- OECD. (2012). Corporate Reporting of Intangible Assets: A Progress Report.
- Oliveira, L., Lima Rodrigues, L., & Craig, R. (2006). Firm-specific determinants of intangibles reporting: evidence from the Portuguese stock market. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 10(1), 11–33. doi:10.1108/14013380610672657
- Petty & Cuganesan. (2005). *Voluntary Disclosure of Intellectual Capital By Hong Kong Companies: Examining Size, Industri and Growth Effects Over Time*. doi:10.1111/j.1835-2561.2005.tb00291.x
- Schuster, P., & O'Connell, V. (2006). The Trend Toward Voluntary Corporate Disclosures. *Management Accounting Quarterly*, 7(2), 1–9.
- Sundaramurthy, C., Mahoney, J. M., & Mahoney, J. T. (1997). Board Structure, Antitakeover Provisions, and Stockholder Wealth. *Strategic Management Journal*, 18(3), 231–245. doi:10.1002/(sici)1097-0266(199703)18:33.0.Co;2-v
- Sveiby, K. E. (1997). The Intangible Assets Monitor. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 2(1), 73–97. doi:10.1108/eb029036
- Vafeas, N. (2003). Length of Board Tenure and Outside Director Independence. *Journal of Business Finance Accounting*, 30(7–8), 1043–1064. doi:10.1111/1468-5957.05525
- Whiting, R. H., & Miller, J. C. (2008). Voluntary disclosure of intellectual capital in *New Zealand annual reports and the “hidden value.”* doi:10.1108/14013380810872725
- Whiting, R. H., & Woodcock, J. (2011). Firm characteristics and intellectual capital disclosure by Australian companies. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 15(2), 102–126. doi:10.1108/14013381111157337
- Widiyaningrum, A. (2004). Widiyaningrum 2014 - Intellectual Capital.Pdf. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* (Vol. 1, pp. 16–25).